

WAWASAN

TRIDHARMA

MAJALAH ILMIAH KOPERTIS WILAYAH IV

NOMOR 6 TAHUN XXIV JANUARI 2012



- Bagaimana Mengasah Kemampuan dan Pengembangan Diri Anda

Oleh : Drs. H. Iding Syamsudin, MM

- Penggunaan Pektin Glukosa pada Proses Pemasakan Serat Kapas

Oleh : Ir. Darmiyanti, M.Si

- Peranan Bahasa Indonesia dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Oleh : Drs. Ahmad Yazidi, M.Pd

- Perkembangan Kebijakan Bank Indonesia tentang Pembiayaan KUMKM dan Sektor Rill Periode

1973 s/d 2008

Oleh : Dr. Heri Nugraha, SE, M.Si

- Peran Mikroorganisme dalam Pertanian Organik

Oleh : Dra. Ina Darliana, M.Si

Wawasan TRIDHARMA

Majalah Ilmiah Bulanan Kopertis Wilayah IV

Informasi Komunikasi dan Pengkajian IPTEK

PELINDUNG
Koodinator Kopertiw Wilayah IV

PEMIMPIN UMUM
Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV

**PIMPINAN REDAKSI//
PENANGGUNGJAWAB**
Prof. Dr. H. Tjahjo Sutisnawidjaja, MS.

PENASEHAT/KONSULTANT REDAKSI
Prof. Dr. Bambang Hidayat
Prof. Dr. Hatta, SH, MH.

PENYUNTING PELAKSANA
Prof. Dr. H. Tjahjo Sutisnawidjaja, MS
Dr. Budi Hartanto, M.Sc.
Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiatie, M.S.
Prof. Dr. Hj. Dewi Laelatul Badriah, M.Kes.
Prof. Dr. H. Endang Komara, M.Si.
Dr. Erni Rusyani, MS.
Dr. Titin Rostini.
Dr. Sayu Putu Yuni Paryati, drh, M.Si.

PENYUNTING AKHIR
Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiatie, M.Si.
Dr. Erni Rusyani, MS.

SEKRETARIS REDAKSI
Ade Nedi Supardi, Drs.

PENGELOLA USAHA
Kopkar Kopertis Wilayah IV
Jl. Penghulu Hasan Mustofa No. 38
Tlp. (022) 7272531 – 7275630 Bandung.

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Kata Pengantar	2
Bagaimana Mengasah Kemampuan dan Pengembangan Diri Anda - Oleh: Drs. H.Iding Syamsudin, MM	3
Penggunaan Pektin Glukosa Pada Proses Pemasakan Serat Kapas - Oleh: Ir.Darmiyanti, M.Si	8
Perubahan Temperatur Atmosfer Bumi Akibat GAS Rumah Kaca - Oleh: Drs. Yusron Suwarso, MS	12
Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Pembentukan Karakter - Oleh: Prof. Dr. H. Endang Komara, Drs., M.Si	17
Pengaruh Jumlah Tabungan Nasabah Terhadap Profitabilitas PT. BPR SAHAT SENTOSA Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya - Oleh: Suminawati,M.Pd.	22
Penerapan Teknologi Pada PT. Sahabat Ternak Abadi (STA) Sebagai Perusahaan Inti Dalam Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler - Oleh: Ir.Sulistyo Sidik Purnomo .Msi , Dr. Ir. Machfud, MS, Prof.Dr.Ir.H. Endang Gumbira-Sa'id, MADev, Dr. Ir. Asnath Maria Fuah, MS	28
Peranan Bahasa Indonesia Dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Nasionalisme) Indonesia - Oleh : Drs. Ahmad Yazidi, M.Pd	37
Mutu Pendidikan dan Partisipasi Kaum Buruh Indonesia Dalam Industri - Oleh: Drs. Abdul Jana, MM.Pd	44
Perkembangan Kebijakan Bank Indonesia Tentang Pembiayaan KUMKM dan Sektor Rill Periode 1973 s/d 2008 - Oleh: Dr. Heri Nugraha, SE. MSi	52
Peran Mikroorganisme Dalam Pertanian Organik - Oleh: Dra. Ina Darliana, Msi	59
Sistematika	64

Perkembangan Kebijakan Bank Indonesia Tentang Pembiayaan KUMKM dan Sektor Rill Periode 1973 s/d 2008

Dr. Heri Nugraha. SE. MSi

Abstrak

Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan program nasional yang memiliki peranan yang strategis karena merupakan bagian integral dari upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan pengusaha kecil perlu diberikan bantuan keuangan maupun bantuan teknis. Di bidang keuangan, perbankan pada dasarnya telah memberikan perhatian yang cukup besar dengan menyediakan berbagai fasilitas kredit kecil, berbagai macam skim kredit telah dikembangkan sejak tahun 70 an sampai dengan sekarang, namun proses perbaikan dan penyesuaian terhadap skim-skim yang ada tetap diperlukan.

Namun disadari bahwa pemanfaatan fasilitas kredit perbankan belum dapat dilakukan secara optimal oleh sektor usaha tersebut, karena berbagai kendala yang dihadapi baik oleh sektor perbankan maupun pelaku KUMKM. Untuk itu, masih perlu dikembangkan upaya untuk meningkatkan akses KUMKM kepada kredit perbankan dengan cara melakukan penyempurnaan kebijaksanaan Kredit Usaha Kecil, yang saat ini dikenal dengan skim kredit KUMKM, untuk memberikan iklim yang kondusif, perlu dikembangkan sistem kelembagaan perbankan yang sehat agar dapat meningkatkan pelayanannya kepada KUMKM, dan perlu pengembangan berbagai program dan proyek untuk memperluas pembiayaan ke sektor usaha yang strategis dan berdampak luas. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan kredit KUMKM secara optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

I. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia yang mengarah kepada pemberdayaan KUMKM menjadi petunjuk yang jelas bahwa KUMKM sebagai bagian dari pelaku ekonomi mendapat perhatian tersendiri dari pemerintah. Hal ini tentu akan menjadi kenyataan tidak terhindarkan bahwa setiap

pelaku usaha Perbankan yang ada di Indonesia harus membantu dalam pemberdayaan KUMKM dengan membuka akses kredit untuk mendukung usahanya.

Sebagaimana kita ketahui bersama saat ini, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) masih mendapat tempat tertinggi di mata seluruh elemen

bangsa, terutama pelaku bisnis. KUMKM tidak lagi dipandang dengan sebelah mata. Alasannya sederhana saja. Sejarah keterpurukan ekonomi Indonesia mencretat, ketika sebagian besar kelompok usaha besar (korporasi) kolaps dilanda badi krisis moneter (krismon) pada awal 1998, KUMKM tetap hidup dan bahkan mampu

bergerak maju hil heran jika perba mengucurkan da KUMKM hingga triliun lebih.

KUMKM teknologi serta kontribusi besar terhadap lapangan kerja. M Indonesia (BI), semerap 79,04 atau 99% dari total yang bekerja. Terhadap total PDB cukup 57%. Dengan kontribusi KUMKM bangsa menjadi kendati begitu, kesempatan yang pemerintah untuk KUMKM masih optimal. Akibatnya KUMKM pun sesuai maksimal. Secara persoalan utama jadi pengganjalnya:

- a. Masalah *problems*, yakni modal, kualitas manusia, pengelolaan dan akses pembiayaan
- b. Kalaupun sudah berhasil melewati keuangan dan masalah lanjut *problems* masih yakni pengenalan pasar baik dan eksport yang sangat minim.

c. Permasalahan adalah *intermedia* datang dari instansi perizinan, perpajakan dan hukum.

Tiga permasalahan tersebut tentu rasa lesuan tidak hanya di pemerintah, tapi yang turut merasakannya KUMKM. Mereka satu padu mendukung pergerakan KUMKM cepat. Tak perlu

bergerak maju hingga hari ini. Tak heran jika perbankan ramai-ramai mengucurkan dananya di sektor KUMKM hingga mencapai 400 triliun lebih.

KUMKM telah memberikan andil serta kontribusi yang sangat besar terhadap penyediaan lapangan kerja. Menurut data Bank Indonesia (BI), sektor ini mampu menyerap 79,04 juta tenaga kerja atau 99% dari total angkatan kerja yang bekerja. Kontribusi KUMKM terhadap total produk domestik bruto (PDB) cukup signifikan, yakni 57%. Dengan kondisi seperti itu, peran KUMKM bagi perekonomian bangsa menjadi sangat penting. Kendati begitu, perhatian dan kesempatan yang diberikan pemerintah untuk pengembangan KUMKM masih dirasakan belum optimal. Akibatnya, pengembangan KUMKM pun sesungguhnya belum maksimal. Secara umum, ada tiga persoalan utama yang masih menjadi penghalangnya.

a. Masalah mendasar (*basic problems*), yakni keterbatasan modal, kualitas sumber daya manusia, pengembangan produk, dan akses pemasaran.

b. Kalau pun suatu KUMKM telah berhasil melewati fase akses keuangan dan pemasaran, permasalahan lanjutan (*advanced problems*) masih merintanginya, yakni pengenalan dan penetrasi pasar baik domestik maupun ekspor yang sangat terbatas dan minim.

c. Permasalahan berikutnya adalah *intermediate problems* yang datang dari instansi terkait, seperti perizinan, perpajakan, agunan, dan hukum.

Tiga permasalahan utama tersebut tentu menuntut penyelesaian tidak hanya dari pihak pemerintah, tapi berbagai pihak yang turut menentukan kemajuan KUMKM. Mereka selayaknya bersatu padu mendorong terciptanya pergerakan KUMKM yang lebih cepat. Tak perlu lagi ada saling

lempar tanggung jawab. Tak perlu lagi sekadar saling himbau atau saling menyalahkan. Terobosan baru untuk pengembangan KUMKM secara lebih luas dan besar mesti segera dilakukan. Misalnya, KUMKM yang skala usahanya berhasil naik kelas diberi peluang lebih besar untuk mengembangkan usahanya. Di sisi lain, KUMKM yang masih berkutat dengan berbagai persoalan mendasar atau *basic problems* harus tetap diberi penyalaman yang efektif dan akses yang luas ke arah kemampuan mengatasi beragam problem yang dihadapinya. Di sisi lain, pemerintah makin menyokong dengan kebijakan dan sistem birokrasi yang mampu menguatkan peran dan daya saing KUMKM. Hanya dengan cara seperti itu, perkembangan KUMKM bisa lebih optimal.

Peran KUMKM sangat penting dan strategis dalam perekonomian nasional. KUMKM memiliki jumlah 44,8 juta unit usaha, yang berkontribusi secara signifikan dalam penyerapan tenaga kerja sebanyak 77,6 juta (99,4% total angkatan kerja yang bekerja) dan sumbangan PDB Nasional (54,22%).

Populasinya yang berjumlah sekitar 51,26 juta unit usaha adalah 99 persen dari seluruh unit usaha yang ada di tanah air. Sedangkan jumlah usaha kecil sebesar 450 ribu unit atau 13% dari jumlah perusahaan, serta usaha menengah dan besar sebesar 450 ribu unit atau 13% dari jumlah perusahaan, serta usaha menengah dan besar sebesar 200 ribu unit atau 0,6% dari jumlah perusahaan. Khusus usaha mikro dan kecil, sekitar 16,35 juta unit merupakan sektor informal, serta 17,6 juta unit merupakan semi informal dan formal. Selanjutnya, bila dilihat secara sektoral untuk usaha mikro dan kecil, sektor pertanian mempunyai kontribusi terbesar yaitu sekitar 19,5 juta unit atau 57%,

industri besar 2,5 juta unit atau 7% serta perdagangan dan jasa sebesar 12,45 juta unit atau 36%.

II. Perkembangan SKIM Kredit KUMKM Perbankan (Era Orde Baru S/D Era Kabinet Indonesia Bersatu)

Sejak awal pembangunan nasional, perbankan telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan usaha kecil dengan menyediakan kredit yang dapat menunjang pembiayaan usaha kecil dan koperasi melalui berbagai fasilitas kredit kecil bersubsidi. Hal ini dimulai dengan diperkenalkannya pola Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen (KIK/KMKP) pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, pola tersebut dilikuti oleh beberapa pola kredit koperasi dan kredit kecil lainnya seperti Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja (KI/KMK) s.d Rp. 75 juta, Kredit Mini; Kredit Midi, Kupedes, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Keppres 14A/198, Kredit Profesi Guru (KPG), Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), dan lain-lain.

Di samping itu, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan koperasi, maka perbankan juga memberikan kredit kepada koperasi antara lain Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit kepada KUD (KKUD), dan Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA). Skim kredit koperasi dan kredit tersebut didukung Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dengan persyaratan yang ringan seperti suku bunga rendah, tidak mutlak diperlukan dana sendiri, jaminan cukup proyek/usaha yang dibayai, penilaian kredit lebih ditekankan pada kelayakan usaha. Selain itu untuk mengurangi risiko, kredit diasuransikan kepada PT. Askindo dan Perum PKK untuk kredit kepada koperasi.

Pemberian kredit koperasi dan kredit kecil tersebut telah mem-

berikan sumbangan yang berarti terhadap perkembangan ekonomi nasional. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa program pemberian kredit tersebut telah memberikan sumbangan yang menentukan dalam usaha pencapaian swasembada beras pada tahun 1984. Selain itu, dari studi dampak yang dilakukan Bank Indonesia, program kredit tersebut telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan pengusaha kecil, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan nilai tambah produksi dan investasi.

Penyediaan bantuan dana bersubsidi tersebut dimungkinkan karena meningkatnya penerimaan negara yang cukup besar dari minyak dan gas bumi (migas). Akan tetapi dengan semakin menurunnya penerimaan dari sektor migas sejak pertengahan 1980-an, maka demi mempertahankan kelanjutan pembangunan ekonomi, pertumbuhan pendapatan dan dengan tetap mempertahankan kestabilan moneter, perlu dilakukan penyesuaian strategi dan kebijaksanaan pemberian fasilitas dalam pengembangan usaha kecil. Untuk menjaga dan mempertahankan hasil yang telah dicapai sebagaimana telah disebutkan di atas, Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan penyempurnaan sistem perkreditan yang dikenal dengan Paket Kebijaksanaan 29 Januari 1990 (Pakjan 90). Kebijaksanaan penyempurnaan sistem perkreditan ini bertujuan untuk memantapkan fungsi perbankan dan lembaga keuangan sebagai pengelola dan pelaksana sistem perkreditan nasional. Sejalan dengan ini, peranan Bank Indonesia di-dudukkan secara lebih tepat sebagai *lender of last resort* dan bukan sebagai *lender of first resort* seperti dalam mekanisme KLBI yang selama ini berlaku. Peranan Bank Indonesia dimantapkan

sebagai pemelihara keseimbangan moneter, sekaligus sebagai pembina dan pengawas perbankan agar bank-bank di Indonesia dapat berkembang makin sehat. Sistem perkreditan nasional lebih di-sehatkan, sehingga dapat lebih meningkatkan efisiensi dalam alokasi dana masyarakat ke arah kegiatan produktif untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, dan sekaligus meningkatkan penge-rahan dana masyarakat, serta mengurangi ketergantungan pada KLBI. Program kredit bagi usaha kecil disempurnakan agar pelaksanaannya lebih mantap dan makin terarah, serta didukung dan dilakukan secara lebih luas oleh semua pihak.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka arah kebijakan perkreditan adalah mengurangi secara bertahap peranan KLBI dalam pemberian kredit perbankan untuk berbagai program dan kegiatan, dan untuk selanjutnya meningkatkan peranan perbankan dalam penyediaan dana dan pemberian kredit untuk berbagai keperluan tersebut. KLBI dalam jumlah yang terbatas hanya diberikan untuk mendukung upaya pelestarian swasembada pangan, pengembangan koperasi, serta peningkatan investasi untuk sektor tertentu. Menyederhanakan struktur suku bunga, sehingga dapat terbentuk suku bunga pasar dengan tingkat yang wajar, dengan mengupayakan penurunan suku bunga sehingga dapat mencapai tingkat yang wajar antara lain melalui pengendalian inflasi dan kurs mata uang rupiah terhadap valuta asing, melalui kebijakan moneter yang menggunakan alat-alat kebijakan tidak langsung sesuai dengan alam deregulasi. Semua bank diwajibkan untuk menyediakan kredit kepada usaha kecil minimum 20% dari jumlah pemberian kredit setiap bank, dimana kredit tersebut merupakan

Kredit Usaha Kecil (KUK).

Sejak adanya kebijakan tersebut, pola kredit yang didukung oleh KLBI hanya terbatas bagi Kredit kepada Koperasi yaitu KUT, KKUD, dan KKPA; Kredit kepada Bulog untuk Pengadaan Pangan Nasional; dan Kredit Investasi untuk sektor tertentu. Kredit investasi tersebut diberikan untuk semua sektor yang diberikan oleh lembaga keuangan yang bergerak di bidang pembangunan; dan sektor perkebunan seperti PIR-Trans, PIR, PSN dan PRTE yang diberikan oleh bank-bank umum dan pembangunan; serta KPR yang diberikan oleh lembaga keuangan yang ditugasi untuk itu. Kredit investasi ini akan dikurangi secara bertahap, dan diakhiri pada bulan Maret 1994 untuk Kawasan Barat Indonesia dan bulan Maret 1995 untuk Kawasan Timur Indonesia. Untuk skim kredit di luar skim-skim kredit tersebut di atas, dibiayai dana masyarakat yang dihimpun perbankan.

Dengan penyempurnaan sistem perkreditan tersebut di atas, maka bidang keuangan nasional melangkah lebih maju lagi. Bank-bank makin berkembang sebagai pengelola dan pelaksana utama dari perkreditan nasional, dan KLBI diupayakan untuk diturunkan secara berangsur-angsur sehingga akhirnya perbankan dapat membiayai pemberian kreditnya dengan dana yang dihimpun dari masyarakat. Di samping itu, program KUK yang mendapatkan dukungan dan partisipasi menyeluruh dari semua bank dapat makin meningkatkan dan memperbesar kemampuan serta peranan usaha kecil dan koperasi dalam pembangunan nasional, yang pada gilirannya akan membantu tercapainya sasaran pemerataan, kesempatan berusaha, dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, untuk lebih mendorong pemberian kredit perbankan termasuk KUK, telah

dikeluarkan Pak Mei 1993 (Pakm menyempurnakai yang menyangku Rp. 200 juta mei Di samping itu, antar bank dalar yang terdiri dari ba BPR, pola p (channeling), bersama (joint fi piutang (factorin dengan diperken sama melalui S pada itu, unt pemberian KUK c Bank Umum da prestasinya dali KUK dan memi BPR. Hal ini mer BPR berlokasi c lebih mengenal p wilayahnya, seh akan mampu mi nya dan men bangan dunia terutama usaha k

Kebijaksanaan serangkaian kebij telah memberika terhadap penyal masuk pemberia koperasi yaitu da pada akhir Dese ningkat menjadi triliun, atau naik 20% per t kenaikan total kri pada periode yan 18,5% per demikian kenaika masih lebih baik c total kredit. Ke nunjukkan adan perbankan dalam kecil.

Berdasarkan Indonesia Tahun 1 plafon kreditnya, KUK dinikmati r plafon kredit s.d. sekitar 25,3% dinikmati nasabat kredit di atas Rp.

(KUK).
nya kebijakan
lit yang didukung
terbatas bagi
erasi yaitu KUT,
; Kredit kepada
igadaan Pangan
Kredit Investasi
ertentu. Kredit
diberikan untuk
g diberikan oleh
n yang bergerak
bangunan; dan
in seperti PIR-
dan PRPTE yang
ank-bank umum
; serta KPR yang
nbaga keuangan
ituk itu. Kredit
dikurangi secara
khiri pada bulan
Kawasan Barat
ilan Maret 1995
timur Indonesia.
di luar skim-skim
li atas, dibiayai
yang dihimpun

penyempurnaan
tersebut di atas,
jangan nasional
maju lagi. Bank-
embang sebagai
elaksana utama
asional, dan KLBI
uk diturunkan
angsur sehingga
an dapat mem-
kredinya dengan
oun dari masya-
itu, program KUK
n dukungan dan
uruh dari semua
n meningkatkan
ar kemampuan
saha kecil dan
pembangunan
pada gilirannya
u tercapainya
ian, kesempatan
1 penciptaan

ituk lebih men-
in kredit per-
k KUK, telah

dikeluarkan Paket Kebijaksanaan
Mei 1993 (Pakmei 93), antara lain
menyempurnakan ketentuan KUK
yang menyangkut plafon kredit di
Rp. 200 juta menjadi Rp. 250 juta.
Di samping itu, pola kerjasama
antar bank dalam penyaluran KUK
yang terdiri dari pemberian kredit
langsung dari bank umum kepada
BPR, pola penerusan kredit
(channeling), pola pembiayaan
bersama (joint financing) dan anjak
piutang (factoring) telah diperluas
dengan diperkenalkan pola kerja-
sama melalui SBPU-KUK. Dalam
pada itu, untuk mengarahkan
pemberian KUK di pedesaan, maka
Bank Umum dapat meningkatkan
prestasinya dalam menyalurkan
KUK dan membantu pendanaan
BPR. Hal ini mengingat, umumnya
BPR berlokasi di pedesaan dan
lebih mengenal para pengusaha di
wilayahnya, sehingga diharapkan
akan mampu memperluas usaha-
nya dan membantu pengem-
bangan dunia usaha setempat,
terutama usaha kecil.

Kebijaksanaan Pakjan 90 dan
serangkaian kebijaksanaan lanjutan
telah memberikan dampak positif
terhadap penyaluran KUK, termasuk
pemberian kredit kepada
koperasi yaitu dari Rp. 14,0 triliun
pada akhir Desember 1989, me-
ningkat menjadi sebesar Rp. 36,6
triliun, atau naik dengan rata-rata
20% per tahun, sedangkan
kenaikan total kredit dalam rupiah
pada periode yang sama rata-rata
18,5% per tahun. Dengan
demikian kenaikan KUK tersebut
masih lebih baik daripada kenaikan
total kredit. Keadaan ini me-
nunjukkan adanya kesungguhan
perbankan dalam membina usaha
kecil.

Berdasarkan data Bank
Indonesia Tahun 1995, penyebaran
plafon kreditnya, 44,9% dari total
KUK dinikmati nasabah dengan
plafon kredit s.d. Rp. 25 juta, dan
sekitar 25,3% dari total KUK
dinikmati nasabah dengan plafon
kredit di atas Rp. 25 juta s.d. Rp.

100 juta. Sedangkan sisanya,
sebesar 29,8% diminati oleh
nasabah dengan plafon kredit di
atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta.
Secara keseluruhan, rata-rata KUK
relatif kecil yaitu Rp. 6,2 juta per
rekening. Dengan demikian,
sebagian besar dari KUK masih
dinikmati oleh usaha kecil yang
plafon kreditnya relatif kecil.
Sedangkan berdasarkan sektor
ekonominya, sebagian besar (35,7%)
dari total KUK atau Rp.
13,0 triliun (17,3%), perindustrian
sebesar 3,2 triliun (8,9%),
pertanian sebesar Rp. 2,5 triliun
(6,8%) dan sektor lain-lain Rp.
11,6 triliun (31,3%). Mengingat
prioritas Pelita VI antara lain
adalah pembangunan sektor-sektor
di bidang ekonomi dengan
terkaitan antara industri dan
pertanian maka pemberian KUK
untuk pengembangan kedua sektor
tersebut masih perlu ditingkatkan
khususnya dalam pola keterkaitan
antara pertanian dan perindustrian
(agro industri).

Berdasarkan penyebaran
daerah, terlihat bahwa pengsa KUK
di perkotaan mengalami penurunan
sebesar 18,1% yaitu dari 78,2%
menjadi 60,1%, atau sebesar Rp.
22,0 triliun ada di perkotaan.
Dengan demikian pangsa KUK di
pedesaan mengalami kenaikan dari
21,8% menjadi 39,9% atau
sebesar Rp 14,6% triliun ada di
pedesaan. Namun dilihat dari
jumlah rekeningnya, sebesar 3,8
juta rekening ada di pedesaan,
sedangkan di perkotaan hanya 2,1
juta rekening. Dengan demikian,
menunjukkan bahwa telah terjadi
peningkatan arah pemberian KUK
ke area pedesaan dan diharapkan
untuk lebih ditingkatkan di masa
 mendatang.

Selama kurun waktu 4 tahun
(1990-1995), berdasarkan penye-
baran di Jawa dan di luar Jawa
dapat dilihat bahwa 67,1% dari
total KUK atau Rp. 24,5 triliun
masih ada di Jawa. Sedangkan
sisanya sebesar Rp. 21,1 triliun ada

di luar Jawa. Untuk itu arah
pemberian KUK perlu dilakukan ke
luar Jawa khususnya Kawasan
Timur Indonesia yang banyak
mempunyai potensi untuk di-
kembangkan lebih lanjut.

3.1. Permasalahan Pelaksanaan KUK

Melihat keragaman tersebut di atas
dapat disimpulkan bahwa ke-
bijaksanaan perkreditan (Pakjan
90) telah berhasil dengan baik,
karena kebijakan tersebut—mem-
punyai dampak positif yaitu KUK
telah berkembang cukup pesat
selama 4 tahun terakhir. Namun
demikian disadari bahwa saat ini
masih ada keluhan dari sebagian
masyarakat (usaha kecil) mengenai
sulitnya memperoleh KUK atau
akses kepada bank. Hal ini
menunjukkan bahwa KUK belum
dapat dimanfaatkan secara optimal
oleh masyarakat, yang disebabkan
oleh beberapa kendala yang
dihadapi baik dari pihak pengusaha
kecil maupun pihak bank.

Dari sisi permintaan, umumnya
kendala nasabah usaha kecil untuk
memperoleh KUK adalah belum
mampu mungkapkan kelayakan
usahaannya, adanya keterbatasan
pada aspek pemasaran, teknis
produksi, manajemen dan
organisasi, serta belum mampu
memenuhi persyaratan bank
teknis, antara lain jaminan dan
perizinan.

Secara sektoral kendala yang
dihadapi usaha kecil adalah sbb:

- a. Di sektor pertanian, antara lain
lemahnya kemampuan pengelolaan
sumber daya lahan, lemahnya
lembaga dan organisasi di daerah
pedesaan, kurangnya infrastruktur
terutama transportasi dan
komunikasi, kurangnya dukungan
dari lembaga keuangan formal dan
keterbatasan penggunaan
teknologi.
- b. Di sektor perindustrian, antara
lain mesin dan peralatan kurang
memadai, mutu bahan masukan
kurang sesuai, kurang pengguna-

teknologi, kelemahan dalam rekapita, organisasi, pengendalian produksi dan kelemahan dalam bidang akuntansi dan pengadaan biaya.

C. Di sektor perdagangan dan jasa, umumnya belum efisien, masih kurang penguasaan teknologi dan tenaga kerja yang berketrampilan rendah.

Dari sisi perbankan, beberapa kendala dalam penyaluran KUK adalah tingginya biaya transaksi, sulitnya memperoleh usaha kecil yang layak, tingginya risiko dan terbatasnya jaringan kantor cabang bank. Dalam hal biaya transaksi pinjaman, terdapat 2 ciri khusus yang cukup penting dan berpengaruh terhadap ekonomi lembaga keuangan dan perilaku pinjaman. Pertama, adalah biaya yang tercermin dalam R/L yang tergantung kepada jumlah peminjam, sedangkan pendapatan secara tersendiri tergantung kepada besarnya volume kredit. Kedua, beberapa literatur mengasumsikan bahwa biaya transaksi dalam hal waktu kerja staf dan pekerjaan administrasi adalah sama untuk jumlah nilai kredit yang berbeda-beda. Sebaliknya pendapatan bunga yang diterima bergantung kepada besarnya jumlah pinjaman. Sehingga lembaga keuangan/bank cenderung memberikan kredit skala besar untuk menurunkan biaya per unit (*relative transaction costs*) untuk meningkatkan keuntungan. Dengan demikian maka biaya transaksi untuk kredit skala kecil menjadi relatif tinggi.

3.2. Upaya Mengoptimalkan KUK

Kebijakan Bank Indonesia dalam rangka mengoptimalkan pengembangan usaha kecil dan koperasi terutama ditujukan untuk mendorong dan membantu meningkatkan kemampuan perbankan dalam rangka memperluas akses para pengusaha kecil

terhadap kredit dan jasa perbankan. Peningkatan kemampuan ini menyangkut kerangka pengaturan, teknis perbankan, kelembagaan, maupun pendanaan. Di pihak lain, usaha untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan para pengusaha kecil di bidang teknis dan kewirausahaan pada dasarnya merupakan tugas bersama yang menyangkut berbagai instansi dan lembaga.

Oleh karena itu, mobilisasi daya dan dana yang lebih maksimal serta koordinasi yang lebih terpadu, sangat diperlukan diantara berbagai instansi dan lembaga tersebut. Bank Indonesia melalui Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK) dan Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK), di samping berusaha memecahkan masalah kelembagaan dan pendanaan, juga berusaha meningkatkan komitmen dan kemampuan perbankan dalam mengidentifikasi sektor usaha serta pengusaha kecil yang potensial, memberikan bimbingan teknis dan mengembangkan cara dan sistem pelayanan yang dapat mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh tingginya risiko dan biaya transaksi. Secara lebih rinci, strategi dan kebijaksanaan yang telah dan akan dilakukan oleh Bank Indonesia untuk lebih mendorong peningkatan dan pengembangan kredit kecil dan koperasi di masa mendatang dapat dikemukakan berikut ini.

Pengembangan kelembagaan Mendorong dan membantu meningkatkan kemampuan perbankan untuk memperluas akses para pengusaha kecil terhadap kredit dan jasa perbankan. Peningkatan kemampuan ini menyangkut antara lain usaha untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kemampuan bank dalam melayani usaha kecil antara lain dengan lebih memanfaatkan BPR dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan

(LDKP) yang mempunyai jaringan kantor relatif tersebar di wilayah pelosok pedesaan; memprioritaskan pembukaan kantor bank umum di luar Dati I dan Dati II; dan memberikan pelatihan teknis operasional bank kepada petugas BPR/LDKP melalui berbagai program pelatihan.

Pengembangan kredit program Kredit program yang ada pada saat ini, baik yang masih didukung dengan KLBI, terutama Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit kepada KUD (KKUD), dan Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA), maupun yang merupakan program Two-Steps-Loan (TSL), akan lebih ditingkatkan dan diperluas penggunaannya, antara lain melalui penyempurnaan pola-pola kredit tersebut.

a. Kredit Usaha Tani (KUT)

Tujuan pemberian KUT adalah membantu petani yang belum mampu membiayai sendiri usaha taninya, sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatannya, dan membantu KUD agar dapat mengembangkan usahanya, sehingga dapat berperan sebagai satu kekuatan ekonomi yang mantap di pedesaan. Pola KUT diperluas sehingga dapat digunakan untuk membiayai komoditas hortikultura, yang terdiri dari pisang, nenas, pepaya, markisa, jeruk, salak, cabai merah, bawang merah, kentang dan jahe. Diversifikasi komoditas tersebut merupakan alternatif bagi petani yang lahannya relatif kecil yang mengakibatkan petani tersebut sulit untuk melakukan budidaya tanaman pangan. Dalam kaitan ini, peranan koperasi yang lebih besar sangat diperlukan dalam aspek pemasaran hortikultura tersebut. Untuk mempercepat akselerasi mala dibuat KUT Pola Khusus adalah Pertama, pencairan KUT Pola Khusus, dengan ketentuan yang berbeda dengan pola umum yaitu dilakukan dalam bentuk tunai sekaligus untuk kebutuhan

intensifikasi pa hortikultura se Sedangkan pada berjalan, peny dilakukan oleh setiap musim peranan kelomp ditingkatkan da kebersamaan da renteng sebaga Kelompok tani untuk menu budaya menab kelompok tani terbentuknya yang dapat di tani dan pen dengan kredit, k kredit karena tidak akan diatasi. penyalurannya Prosedur penga kredit dari peta memperoleh Kl diperlukan di disederhanakan tahap. Ketiga meliputi; petani nya mengajukan KUD, kemudian mengkoordinir kepada bank selanjutnya ban rmemberikan KU kelompok tani y Dan Keempat, komponen strukt bunga yang sen meliputi bunga k diubah menjad imbalan dan tab Walaupun telah Pola Khusus, berjalan selama Umum) tetap beberapa penye bahwa kelopo mempunyai tab dan disimpan di berlaku untuk Po kedua progra diharapkan da ningkatkan dan berian kredit

npunyai jaringan sebar di wilayah 1; memprioritas- antor bank umum an Dati II; dan elatihan teknis kepada petugas alui berbagai

n kredit program ng ada pada saat masih didukung terutama Kredit), Kredit kepada Kredit Koperasi gotanya (KKPA), upakan program TSL), akan lebih diperluas peng- ra lain melalui pola-pola kredit

ni (KUT) n KUT adalah i yang belum ai sendiri usaha a dapat me- uksi dan pen- membantu KUD mengembang- ga dapat ber- sru kekuatan tap di pedesaan. sehingga dapat ik membiaya tura, yang terdiri enas, pepaya, ak, cabai merah, intang dan jahe. oditas tersebut atif bagi petani elatif kecil yang etani tersebut kukan budidaya Dalam kaitan ini, yang lebih besar dalam aspek tura tersebut. epat akselerasi Pola Khusus pencairan KUT ngen ketentuan gan pola umum am bentuk tunai k kebutuhan

intensifikasi padi, palawija dan hortikultura selama 1 tahun. Sedangkan pada KUT yang saat ini berjalan, penyaluran kreditnya dilakukan oleh bank kepada KUD setiap musim tanam. Kedua, peranan kelompok tani akan lebih ditingkatkan dari segi organisasi, kebersamaan dan tanggung jawab renteng sebagai penerima kredit Kelompok tani dengan tujuan untuk menumbuh-kembangkan budaya menabung para anggota kelompok tani dan mendorong terbentuknya akumulasi modal yang dapat digunakan kelompok tani dan pengkaitan tabungan dengan kredit, kesulitan pemberian kredit karena tidak adanya agunan akan diatasi. Ketiga, prosedur penyalurnya disederhanakan. Prosedur pengajuan permohonan kredit dari petani sampai dengan memperoleh KUT yang semula diperlukan dua belas tahap, disederhanakan menjadi cukup tiga tahap. Ketiga tahap tersebut meliputi; petani melalui kelompoknya mengajukan kredit kepada KUD, kemudian KUD secara kolektif mengkoordinir pengajuan kredit kepada bank setempat, dan selanjutnya bank tersebut dapat memberikan KUT langsung kepada kelompok tani yang bersangkutan. Dan Keempat, penyempurnaan komponen struktur bunga. Struktur bunga yang semula komponennya meliputi bunga kredit dan imbalan, diubah menjadi bunga kredit, imbalan dan tabungan kelompok. Walaupun telah diberlakukan KUT Pola Khusus, pola KUT yang berjalan selama ini (KUT Pola Umum) tetap berlaku dengan beberapa penyesuaian, antara lain bahwa kelompok tani diwajibkan mempunyai tabungan, kelompok dan disimpan di bank, seperti juga berlaku untuk Pola Khusus. Adanya kedua program KUT tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan dan memperluas pemberian kredit untuk mendukung

pelestarian swasembada pangan dan pengembangan koperasi. b. Kredit Kepada KUD (KKUD) Tujuan pemberian kredit kepada KUD adalah untuk membantu permodalan KUD di dalam melaksanakan program pemerintah, guna menampung hasil produksi petani agar tingkat harga yang wajar yang dibayarkan kepada petani cukup terjamin. Untuk membantu kelancaran pemasaran komoditas-komoditas yang dibiayai dengan KUT, maka skim KKUD juga diperluas sehingga dapat digunakan untuk membiayai pengadaan komoditas hortikultura, yang dilaksanakan secara selektif komoditas dan daerahnya dalam rangka menjamin pemasarannya. c. Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) Tujuan pemberian KKPA adalah untuk menyediakan fasilitas permodalan anggota koperasi guna menunjang peningkatan usaha dan pendapatan mereka, sekaligus untuk mengembangkan kegiatan koperasi.

Plafon kredit kepada masing-masing anggota koperasi yang semula sebesar Rp. 30 juta ditingkatkan menjadi Rp. 50 juta. Dapat ditambahkan pula bahwa KKPA ini dapat digunakan untuk membiayai program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Kredit diberikan oleh semua bank umum yang sekurang-kurangnya cukup sehat. Pemberian KKPA ini akan diutamakan untuk mendorong pola kemitraan antara pada pengusaha kecil dengan pengusaha besar dan sekaligus mendorong perkembangan koperasi dan transmigrasi.

d. Two-Step-Loan (TSL) Sedangkan dalam rangka mengatasi kelangkaan dana jangka panjang di dalam negeri untuk pembiayaan investasi, pinjaman luar negeri (TSL) akan terus ditingkatkan dari negara donor atau lembaga keuangan internasional, antara lain Bank

Dunia, Overseas Economic Cooperation Fund/Asean Japan Development Fund (OECF/AJDF), Exim Bank of Japan, dan Asian Development Bank (ADB).

IV. Kebijakan Pasca KLBI

Setelah reformasi di sektor moneter tahun 1998, maka peran KLBI ditiadakan dari Bank Indonesia sehingga saat ini yang melaksanakan skim-skim tersebut di atas adalah Perbankan, baik BPR maupun Bank Umum. Sedangkan Bank Indonesia berperan secara tidak langsung dalam menggerakkan sektor riil antara lain dengan memberikan Bantuan Teknis (PBI No. 8 Tahun 1997), bagi pelaku Perbankan yang memerlukan bantuan baik keterampilan teknis untuk kredit KUMKM ataupun penyediaan Informasi-informasi yang diperlukan tentang KUMKM.

Sering dengan perkembangan dalam program-program pembendayaan KUMKM, yang saat ini telah mempunyai dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang KUMKM, maka skim kredit yang diluncurkan oleh Lembaga Keuangan baik Bank maupun non Bank saat ini mengacu pada UU tersebut.

V. Penutup

1. Pengembangan KUMKM, merupakan program nasional yang memiliki peranan yang strategis karena merupakan bagian integral dari upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan pengusaha kecil perlu diberikan bantuan keuangan maupun bantuan teknis. Di bidang keuangan, perbankan pada dasarnya telah memberikan perhatian yang cukup besar dengan menyediakan berbagai fasilitas kredit kecil.

2. Namun disadari bahwa pemanfaatan fasilitas kredit perbankan belum dapat dilakukan

secara optimal oleh sektor usaha tersebut, karena berbagai kendala yang dihadapi baik oleh sektor perbankan maupun pelaku usaha. Untuk itu, masih perlu dikembangkan upaya untuk meningkatkan akses KUMKM kepada kredit perbankan dengan cara melakukan penyempurnaan kebijaksanaan Kredit KUMKM untuk memberikan iklim yang kondusif, perlu dikembangkan sistem kelembagaan perbankan yang sehat agar dapat meningkatkan pelayanannya kepada KUMKM, dan perlu pengembangan berbagai program dan proyek untuk memperluas pembiayaan ke sektor usaha yang strategis dan berdampak luas. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan kredit usaha kecil secara optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

3. Upaya pengembangan KUMKM bukanlah semata-mata tanggung jawab dunia perbankan, melainkan

juga merupakan tugas dan komitmen dari semua pihak, hal ini karena permodalan adalah hanya salah satu aspek, di samping masih ada aspek-aspek lain yang lebih penting seperti pemasaran, teknologi dan manajemen yang harus ditingkatkan.

4. Untuk membina dan meningkatkan kemampuan KUMKM, perlu terus dilakukan dan dikembangkan kerjasama dan koordinasi secara terpadu antara perbankan dengan instansi terkait terutama dalam hal pemberian bantuan teknis untuk dapat meningkatkan kelayakan usaha KUMKM.

Daftar Pustaka

- Abdul Salam. *Perkembangan Kredit Usaha Kecil*. Biro Kredit Bank Indonesia. Jakarta 1995
Bank Indonesia. *Laporan Tahun 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995*

....., *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8 Tahun 2007*

Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta 1998

Edy Putra The Aman, *Kredit Perbankan Suatu tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 2000

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 2001

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Raja Grafindo. Jakarta. 2000

M. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2002

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sinar Grafika. Jakarta 2002

Riwayat Penulis

Dr. Heri Nugraha .SE, M.Si Adalah Dosen Yayasan Pendidikan Koperasi (YPK) Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN).

Abstrak

Pertanian meningkat tanaman. penggunaan serta men genetika, menjaga menyatakan tahun telah terhadap pertanian dengan m biologis ya

Pendahuluan

1. Latar Belakang Sejalan dengan meningkatnya konsumsi akan kerusakan lingkungan munculnya berbagai penyakit yang penggunaan bahan kimia berlebihan menyebabkan alternatif pertanian menjadi pilihan bagi Pertanian organik dan satuan alternatif selanjutnya bertani selaras mengembalikan dalam suatu areal